



# Pemerintah Jangan Jadi Objek Pemeriksaan

**Abdul Khoir**  
Borneo Tribune, Pontianak

ANGGOTA BPK RI Komisi VI, Rizal Djalil menegaskan agar instansi seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK) tidak menjadikan pemerintah sebagai bahan bulan-bulanan objek pemeriksaan.

Hal tersebut disampaikan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan suatu daerah dengan memberikan dukungan penyelesaian permasalahan yang tengah dihadapi daerah masing-masing.

"Saya minta BPKP untuk membantu Pemda, jangan jadikan Pemda itu sebagai objek pemeriksaan harus

memberi saran," Kata Rizal Jalil, Kamis (3/11) di DPRD Kalbar.

BPK Perwakilan Kalbar yang merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan terkait pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan dan aset pemerintah, untuk tidak hanya menunggu laporan setiap tahun dari pemerintah, namun harus dapat memberikan fasilitas agar pemerintah dapat menyajikan laporan dan pertanggungjawaban yang baik.

Tidak terkecuali DPRD Kalbar, yang juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, dengan kewenangannya sebagai fungsi kontrol dapat memberikan evaluasi dan masukan bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi, seperti permasa-

lah pemanfaatan atas aset milik Pemprov yang tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan.

"Jangan berbalas pernyataan di media, namun selesaikan dengan duduk bersama," katanya lagi.

Demikian juga BPN, Rizal Jalil akan mendesak instansi yang mengurus masalah tanah ini untuk dapat memberikan fasilitas dan bantuan terkait percepatan penertifikatan masalah lahan yang sudah menjadi aset.

Sementara itu Gubernur Kalbar, Cornelis, akan melakukan kajian mendalam baik secara internal terkait teknis penyelesaian masalah aset tersebut maupun melakukan koordinasi dengan DPRD Kalbar terkait dukungan terutama pembiayaan.

"Jika ada surat (peraturan) yang belum ada, maka kita bikin dan itu butuh anggaran sehingga perlu dukungan dewan," kata Cornelis.

Demikian juga terkait masalah lahan yang saat ini dipergunakan oleh rakyat, Gubernur akan membuka komunikasi dan kajian bagai mana seharusnya dan apakah hasil tersebut dapat dibenarkan dan didukung oleh DPRD Kalbar.

Dengan mematok target bahwa akhir 2011 ini permasalahan aset di Provinsi Kalbar akan menemui jalan terang dan gambaran akan bagaimana permasalahan tersebut akan diselesaikan, Gubernur berharap agar penilaian terhadap keuangan Kalbar akan terus meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian. □